

ISBN : 000-000-00000-0-0



Simposium Nasional

Ilmu Administrasi Negara untuk Indonesia

Yogyakarta, 25 – 26 Maret 2011



**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
2011**

Kerjasama Antar Daerah di Indonesia: Isu dan Tantangan

(studi kasus di Jawa Tengah)

Oleh : Hardi Warsono¹

Abstract

Cooperation among neighbouring region is commonly termed regional cooperation. Inter region cooperation in the study of public administration is categorized as public management especially intergovernmental management. Inter region cooperation in Indonesia has been for a long time trying to fine its form. However, in the middle of its process, the implementer is trapped in doubt. The objective of this paper is to trace the institutional form and its problem in the neighbouring region cooperation. This paper is developed from literature study, observation on inter region cooperation especially in the central Java and some facilitation done by the writer in the several regions in Indonesia. There are two forms of referred institution which is developed on the basis of this networking pattern; they are intergovernmental relation (IGR) and intergovernmental management (IGM). In the mean time, the government support on inter region cooperation which is supposed to form collaboration is hampered by the inconsistency of regulation which is issued by several party (ministry) in the central government.

Key words: inter region cooperation, networking, and collaboration

A. Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi memberikan banyak harapan pada pengembangan kapasitas daerah dalam mensejahterakan masyarakat di seluruh pelosok daerah. Kebijakan sentralisasi seringkali gagal memahami kebutuhan riil masyarakat di daerah. Namun demikian, tidak dapat di-pungkiri begitu saja kenyataan bahwa di negara yang menganut sistem sentralisasi-pun mungkin dapat tumbuh demokrasi, namun adanya otonomi daerah dan desentralisasi akan jauh lebih menjamin tumbuhnya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya (Kelsen, 1973 : 312 dalam Mahfud, Md, 1999).

Sebuah negara berdasarkan prinsip demokrasi dengan sendirinya prinsip otonomi daerah juga menyertainya. Hal ini menjadi niscaya karena salah satu tuntutan penting bagi sebuah sistem demokrasi adalah pemencaran kekuasaan baik secara horizontal (ke samping) yang terlihat dari adanya beberapa lembaga tinggi negara yang sejajar seperti DPR, Presiden, BPK, MA, dan DPA, dan pemencaran horisontal yang ditandai oleh adanya desentralisasi dan otonomi.

¹ Dr. Hardi Warsono, Dosen pada Jurusan Administrasi Publik Fisip Undip dan Pengelola Program Doktor Administrasi Publik-Pascasarjana, Undip

Otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan memang diakui banyak pihak memberikan keleluasaan daerah, namun masyarakat juga menemukan maraknya fenomena egoisme daerah dalam berbagai hal.

Tri Widodo W Utomo² (Peneliti LAN, mahasiswa Nagoya University, Jepang) dalam Kompas, 1 Mei 2003 mengungkapkan fenomena 2 bentuk egoisme lokal tersebut. Pertama, Egoisme³ secara psikologis merujuk pada tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk kepentingan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama. Kedua, secara filsafat ilmu, egoisme merupakan filsafat teori yang mengemukakan bahwa segala perbuatan atau tindakan yang selalu disebabkan oleh keinginan untuk menguntungkan diri sendiri. Penafsiran yang berlebihan-jika tidak dikatakan salah atau keliru-terhadap otonomi inilah yang telah melahirkan egoisme kedaerahan yang sempit. Egoisme ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yakni egoisme ke atas dan egoisme ke bawah. Egoisme pertama terlihat dalam bentuk keengganan daerah tertentu untuk mengindahkan aturan yang lebih tinggi. Sedangkan egoisme daerah yang kedua berbentuk keengganan pemerintah kabupaten/kota untuk berbagi kewenangan (sharing of power) dengan komponen dari masyarakat hukum lainnya. Indikasi terkuat dari hal ini adalah makin luas, besar dan kukuhnya kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Pada saat bersamaan, meskipun ruang partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, namun sesungguhnya belum ada langkah konkret untuk mengurangi peran dan dominasi pemerintah daerah dalam pembangunan. Oleh karena belum ada strategi jelas tentang upaya memberdayakan masyarakat madani, maka partisipasi yang muncul sifatnya sangat superficial dan tidak substantif. Sedangkan egoisme daerah yang kedua berbentuk keengganan pemerintah kabupaten/kota untuk berbagi kewenangan (sharing of power) dengan komponen dari masyarakat hukum lainnya. Indikasi terkuat dari hal ini adalah makin luas, besar dan kukuhnya kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Pada saat bersamaan, meskipun ruang partisipasi publik dibuka seluas-luasnya, namun sesungguhnya belum ada langkah konkret untuk mengurangi peran dan dominasi pemerintah daerah dalam pembangunan. Oleh karena belum ada strategi jelas tentang upaya memberdayakan masyarakat madani, maka partisipasi yang muncul sifatnya tidak substantif.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 egoisme diartikan sebagai tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk kepentingan diri sendiri daripada kesejahteraan bersama.

Egoisme daerah juga nampak dari konflik kepentingan antar daerah dalam pemanfaatan sumberdaya, saling menyalahkan dalam penanggulangan bencana akibat degradasi alam, pencemaran dll. Sementara itu pula sering dijumpai masing-masing daerah berdekatan memasarkan potensi daerahnya sendiri-sendiri, pengelolaan potensi wisata terpisah satu dengan lainnya, terbengkelainya pembangunan daerah perbatasan dan lain sebagainya. Bentuk lain egoisme lokal dalam kerjasama regional berkait dengan fenomena untuk tidak terlibat dan memperhatikan kepentingan pihak lain dalam pengelolaan permasalahan-permasalahan komunitas bersama (isu kolektif).

Keberadaan isu kolektif juga merupakan daya dukung untuk terjadinya manajemen kerjasama regional. Isu-isu kolektif dalam wilayah kerjasama regional ini terutama menyangkut :

- a. pemanfaatan *resources* (sumberdaya), seperti : eksploitasi sumber air, distribusi air bersih, penggunaan lahan
- b. penanggulangan dampak lingkungan seperti : reboisasi lahan lindung, pencemaran sungai oleh kegiatan industri
- c. pengadaan dan peningkatan infrastruktur wilayah pinggiran
- d. penguatan daya tarik investasi, dll.

Bersamaan dengan maraknya fenomena yang menunjukkan egoism daerah, kebijakan dan regulasi pemerintah mengamanatkan perlunya kerjasama daerah untuk mengoptimalkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran praktis juga telah banyak dijumpai kerjasama daerah. Kerjasama daerah ini sebenarnya banyak ragamnya. Regulasi kerjasama daerah pada prinsipnya terkategori menjadi dua, yakni : regulasi pelaksanaan kerjasama dan regulasi penganggaran atau penggunaan keuangan daerah. Untuk perintisan kerjasama, regulasi yang ada cukup dapat dijadikan pedoman, namun nampaknya regulasi belum mempertimbangkan praktek kerjasama lebih dari dua daerah otonom yang berdekatan (regional) yang telah memiliki sejarah panjang dalam melakukan kerjasama. Kegamangan pelaku kerjasama bertambah ketika berhadapan dengan ketatnya aturan pengelolaan keuangan daerah yang tidak memberikan ketegasan dalam penganggaran kerjasama regional.

B. Metode Pengkajian

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian dan fasilitasi kerjasama daerah yang dilakukan penulis. Metode studi kasus digunakan untuk mendapatkan jawaban masalah penelitian dengan mengambil lokasi kerjasama daerah di Jawa Tengah. Sementara itu pengkayaan diperoleh dari berbagai kegiatan fasilitasi kerjasama daerah di berbagai daerah di Indonesia.

C. Perumusan masalah

- 1) Bagaimana ragam kerjasama daerah di Indonesia?
- 2) Apa hambatan pengembangan kerjasama daerah di Indonesia?

D. Pembahasan

Kerjasama dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama (2001;544). Sementara itu, regional didefinisikan sebagai kewilayahan yang terbentuk lebih dari 1 wilayah administratif, baik negara, Provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, manajemen kerjasama regional adalah : “proses pengelolaan kerjasama antar dua atau lebih pemerintah kabupaten/kota yang berdekatan dalam satu wilayah administrasi provinsi yang meliputi kegiatan merencanakan program, memimpin dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran kerjasama”. Konsep yang sangat dekat dan dapat digunakan sebagai pembanding pemahaman regionalisasi adalah *clustering strategy*. Kedua konsep ini perlu dipahami agar tidak rancu pemahaman. Berbeda dengan konsep regionalisasi yang cakupannya lebih luas, *clustering strategy* nampak lebih fokus pada pengelompokan industri pada wilayah tertentu yang terdiri dari beberapa perusahaan dalam sektor yang sama. Dengan kalimat lain, *cluster* merupakan sekelompok perusahaan dan lembaga terkait yang berdekatan secara geografis, memiliki kemiripan yang mendorong kompetisi serta bersifat *complementaris*. Kerjasama regional sejatinya hanyalah salah satu bentuk dari kerjasama daerah. Lalu, apa yang dimaksud kerjasama daerah?

Banyak salah persepsi tentang kerjasama daerah. Dalam banyak pandangan dipahami bahwa kerjasama daerah semata kerjasama antar dua atau lebih daerah otonom

dalam satu atau beberapa sector. Pandangan umum tersebut terlalu sederhana bila kemudian diketahui ternyata banyak macam kerjasama daerah yang satu diantaranya adalah kerjasama antar daerah seperti pemahaman awal tersebut. Ragam kerjasama ini memiliki proses pelebagaan yang beragam pula yang kemudian memiliki tantangan dan hambatan yang beraneka pula.

1. Ragam Kerjasama Daerah Di Indonesia

Kerjasama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Perspektif dalam melihat kerjasama daerah tersebut antara lain dari : (i) dari pelaku kerjasama, (ii) geografis (lokasi) terjadinya kerjasama, (iii) durasi (jangka waktu kerjasama) dilakuka, dan (iv). Sector yang dikerjasamakan.

1) Dilihat dari pelaku kerjasama daerah:

a. Kerjasama antar daerah yang dilakukan antar daerah otonom, meliputi :

(i) kerjasama **antar** kabupaten/ kota,

(ii) kerjasama **antara** Kabupaten/Kota dengan Provinsi, dan

(iii) kerjasama **antar** Kabupaten / Kota dan provinsi (kab/kota – kab/kota – provinsi)

b. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan Pihak ke tiga (swasta)

c. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan hukum

d. Kerjasama antara pemerintah dengan BUMD

e. Kerjasama antar pemerintah daerah yang bersifat massal (APKASI, MPU, dll.)

2) Dilihat dari geografis terjadinya kerjasama daerah :

a. Kerjasama antar daerah yang berdekatan (regional) : bilateral dan multilateral

b. Kerjasama antar daerah yang tidak berdekatan

3) Dilihat dari jangka waktu berlakunya kerjasama daerah (sesuai regulasi Permendagri No 22 tahun 2009):

a. Kurang dari 5 tahun

b. 5 tahun atau lebih

4) Dilihat dari cakupan sektoral kerjasama daerah :

a. *Economic development : regional marketing*, kerjasama dng swasta

- b. *Public services and infrastructure* : kerjasama perbatasan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Selain ragam di atas, kerjasama antar daerah juga dapat dilihat dari intensitas *networking* (jejaring) yang dikembangkan. Secara umum terdapat dua pola asosiasi kelembagaan regional yang didasarkan *networking* yang dikembangkan. Dua pola asosiasi kelembagaan tersebut adalah *Intergovernmental Relations* /IGR, dan *Intergovernmental Management* /IGM. (Mas'udi dalam Praktikno, 2007; 107).

Pada konsep *Intergovernmental Relations* (IGR), pola hubungan antara para anggota hanyalah hubungan koordinatif dalam rangka melakukan kerjasama untuk memperbesar *bargaining power* mereka ketika berhadapan dengan pemerintah federal. Pola asosiasi lebih bersifat *public interest group*, karena lembaga ini hanya berfungsi sebagai pelobi kepada pemerintah federal dan sebagai pemberi masukan kepada pemerintah federal berkaitan penggunaan dana federal (*federal fund*) di negara bagian. Status hukum kelembagaan hanyalah sebagai sebuah forum tanpa kewenangan dalam pemerintahan tertentu. Di Jawa tengah lembaga kerjasama dengan konsep ini pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang belum berhasil mengembangkan *action network*, antara lain terlihat pada Kedungsepur (di Kota Semarang dan sekitarnya).

Konsep. *Intergovernmental Management* (IGM), adalah pola asosiasi antar pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan suatu bidang pemerintahan tertentu yang sama-sama mereka butuhkan. Asosiasi ini terbentuk karena adanya kebutuhan bersama pada bidang tertentu dan keyakinan bahwa apabila bidang tersebut dikerjakan bersama-sama akan tercipta efisiensi dan efektivitas. Salah satu IGM yang ada di Washington State adalah *Sound Transit*, sebuah badan yang membidangi kerjasama bidang transportasi publik. Wilayah kerjasama meliputi *East King County*, *Snohomish County*, *South King County*, *North King County* dan *Pierce County* yang berada di wilayah *Seattle*. Secara lebih spesifik, bidang kerjasama yang dikelola adalah *High Capacity Transportation* (HCT) yang membidangi perkeretaapian dan bus, pusat pemberhentian, serta parkir dan jalur-jalur khusus. Di Indonesia, lembaga kerjasama regional yang mendekati konsep IGM ini terlihat di Barlingmascakeb, Sampan, Kertamantul dan lain-lain yang telah *action network*.

2. Hambatan Pengembangan Kerjasama Daerah di Indonesia

Banyak hambatan yang dihadapi pegiat kerjasama daerah di Indonesia. Hambatan antara lain ditemui dari ego daerah, berbagai regulasi yang belum sinkron, dan hambatan teknis penyelenggaraan kerjasama.

a. Kerjasama regional tanpa kelembagaan :

Banjarkebuka (kerjasama antara Kabupaten Banjarnegara, Kebumen dan Pekalongan) dalam membangun jalan regional merupakan contoh ragam kerjasama antar daerah jenis ini. Kerjasama ini dilaksanakan tanpa kelembagaan. Contoh lain adalah kerjasama bilateral antar pemerintah daerah dalam berbagai sector. Umumnya kerjasama jenis ini berjalan efektif, karena bersifat jangka pendek, setelah tujuan kerjasama dicapai, kerjasama dihentikan. Kegiatan kerjasama regional tanpa kelembagaan ini dapat digunakan untuk manajemen wilayah perbatasan, terutama bila kerjasama tidak lebih dari 5 tahun (sesuai regulasi yang ada).

Banyak kegiatan kerjasama baik yang masih berupa komitmen awal, maupun yang telah mengerucut menjadi keputusan bersama berhenti pada penandatanganan kesepakatan, tidak bergerak menjadi perjanjian kerjasama apalagi menjadi kegiatan riil. Beberapa hambatan tersebut diduga antara lain :

- 1). Kurang kuatnya komitmen antara mereka yang akan bekerjasama
- 2). Kurangnya komunikasi dan koordinasi untuk membentuk kolaborasi dalam kerjasama yang akan diselenggarakan
3. Kurang dipahaminya folosofi kerjasama yang sederajat, berdasarkan consensus dan kesetaraan

b. Kerjasama regional dengan kelembagaan :

Banyak contoh kerjasama dengan raga mini. Di Jawa saja tercatat ada beberapa kerjasama regional dalam 1 provinsi antara lain, Barlingmascakeb, kartomantul, BKAD Subosukawonosraten, Sapta Mitra pantura, BKSP Jabodetabekjur, dll. Kerjasama regional lintas provinsi tercatat : Pawonsari, Karisma pawirogo, dll. Pada

umumnya lembaga kerjasama ini lebih efektif dibandingkan Kedungsepur, Gerbangkertosusilo yang berkembang menjadi Germa (Madura) Kertosusilo, dll. Meski ada beberapa yang menampakkan kegiatan yang berhasil, namun tidak sedikit yang tinggal namanya, tanpa aktivitas yang memadai.

Banyak Faktor yang diduga menyebabkan kegagalan kerjasama regional ini, antara lain :

- 1). Kurang dihayatinya model manajemen *networking*, pola manajemen regional masih dominan berpola birokrasi,
- 2). Masih kentalnya egoisme local yang menghambat proses komunikasi, koordinasi, kooperasi menuju kolaborasi
- 3). Belum terdukungnya regulasi pengelolaan anggaran untuk pengembangan action network pada regional manajemen
- 4). Masih lemahnya peran fasilitasi provinsi pada pengembangan manajemen regional
- 5). Regulasi kerjasama yang ada sangat formal, kurang mengakomodasi fleksibilitas praktek manajemen regional yang telah lama ada

Secara khusus manajemen kerjasama daerah menghadapi hambatan regulasi pengelolaan keuangan daerah, antara lain tertuang dalam ketentuan berikut :

- 1). Penjelasan Pasal 27 ayat 7 huruf "f" PP 58/2005 yang menyatakan bahwa : *Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.*

Pasal 27 ayat 7 huruf "f" PP 58/2005 tersebut di atas berkaitan dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Permendagri 59/2007.

- 2). Pasal 42 ayat (1) menyatakan : *Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,*

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

3). Pasal 44 ayat (1) menyatakan :

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak *secara terus menerus* dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah

Karena hibah tidak bisa diberikan secara terus menerus walaupun hal ini diartikan bahwa pemberian hibah itu ada batas akhirnya, dan hibah hanya bisa diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, maka ada keraguan baru. Keraguan tersebut adalah apakah badan kerja sama antar daerah yang ada di Surakarta, dewan pengarah Sekberkartamantul di Yogyakarta dan dewan eksekutif Barlingmascakeb di Purwokerto serta dewan eksekutif Sampan di Pekalongan, sama dan secara hukum bisa diposisikan sebagai masyarakat atau organisasi kemasyarakatan tersebut.

Kalau ternyata mereka bukan organisasi kemasyarakatan, maka lembaga itu tidak berhak atas hibah dari kabupaten/kota yang mengadakan kerja sama antar daerah.

Belum lagi ketentuan bahwa : hibah juga tidak diperbolehkan dilakukan secara terus menerus.

Harapan baru :

Pada tanggal 22 Juni 2010 yang lalu, telah ditetapkan Permendagri 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, yang diundangkan pada tanggal 24 Juni 2010. Pada angka IV Hal-hal Khusus, angka 3 dinyatakan : "Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah.

Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada

badan kerjasama". Secara umum dukungan dan hambatan kerjasama daerah ini tersarikan dalam table berikut :

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Regional

NO	PELAKU	PENDUKUNG	PENGHAMBAT
1	PEMERINTAH PUSAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Surat Edaran Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005, 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, dan 4. Permendagri Nomor 69 Tahun 2007 tentang : Kerjasama Pembangunan Perkotaan. 	<p>Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah:</p> <p>Permendagri No 13 tahun 2006 (yang direvisi dengan Permendagri no 59 Tahun 2007) TIDAK MEMBERIKAN KETEGASAN DALAM PEMBIAYAAN KERJASAMA DAERAH memberikan dampak psikis berupa ketakutan dan keraguan daerah dalam merintis kerjasama antar daerah.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Permendagri no 22 tahun 2009 6. Permendagri no 23 Tahun 2009 7. Permendagri 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 	<p>Penterjemahan yang beragam, bahwa kerjasama meski dinilai bisa dibiayai dng APBD tetapi kesulitan membuat kategori pos pembiayaan (antara lain dimasukkan hibah kepada lembaga kemasyarakatan). Apakah Lembaga Kerjasama ini dapat diposisikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dapat menerima hibah?</p>
2	PEMERINTAH PROVINSI	Inisiasi Program melalui Bakorlin	Belum adanya payung hukum dan panduan operasional kerjasama antar daerah di tingkat provinsi
3	<p>LEMBAGA PENDAMPING:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GTZ (Jerman) 2. Perguruan Tinggi 3. LSM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis 2. Konsep MR 3. Fasilitasi (mediasi, dana, penyusunan program) 	Terbatasnya kesinambungan Pendanaan
4	PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan kerjasama 2. Komitmen 3. Potensi daerah 	Adanya Ego daerah
5	LEMBAGA PELAKSANA KERJASAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalitas Regional Manager 	<p>-terbatasnya jejaring</p> <p>- Konsep Manajemen Regional yang sesuai regulasi kerjasama daerah belum ada</p>

Sumber . hasil identifikasi dan analisa

E. Penutup

Dari uraian tentang ragam, tantangan dan hambatan kerjasama daerah tersebut dapat terpetakan apa yang masih harus dibenahi dalam kerjasama daerah di Indonesia. Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah : inkonsistensi regulasi antara amanat penyelenggaraan kerjasama daerah dengan tata aturan pengelolaan keuangan daerah yang belum sinkron dan masih terbatasnya pemahaman birokrasi pemerintah tentang hakekat kerjasama daerah yang mestinya bersifat heterakhis yang melibatkan beberapa daerah otonom, bukan birokratis seperti pengelolaan dalam satu organisasi.

Daftar Pustaka

- Md., Mahfud, 1999, *Otonomi Daerah Sebagai Keharusan Agenda Reformasi Menuju Tata Indonesia Baru*, Artikel Diskusi Panel Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, 10-09-1999 di Unibraw.
- Pratikno (Ed.), 2007, *"Kerjasama Antar Daerah : Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan"*, Jogja Global Media, Yogyakarta
- Warsono, Hardi, 2004, *"Resolusi konflik Menuju Kerjasama Antar Kota di Era Otonomi Daerah"*, dalam "Dialogue", Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol.1 No. 1, Januari 2004, MAP UNDIP, Semarang
- , 2009, *Regionalisasi dan manajemen Kerjasama Antar Daerah, (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah)*, Ringkasan Disertasi, tidak dipublikasikan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- SE Mendagri Nomor 120/1730/SJ perihal : *Kerjasama Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah*
- Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah*
- Permendagri Nomor 23 tahun 2009 Tentang *Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah*
- Permendagri 37/2010 tentang *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011*

BIODATA

PERSONAL INFORMATION :

1. Full Name : Dr. HARDI WARSONO, MTP
2. Pekerjaan : Lecturer of Public Administration Department, the Faculty of Social Science and Politics, Diponegoro University; Lecturer and executive of Doctoral Program in Public Administration (DAP), Diponegoro University.
3. Home Address : Jl. Padi III/B.188-189 Genuk Indah Semarang
4. Phone Numbers : 024-6581434 (Home)
08122933583 (Cellular)
5. Email : hardie_wsn@yahoo.com
6. Office Address : Magister dan Doktor Administrasi Publik (MAP dan DAP)- Gd. Pascasarjana Undip Lt. 2 Jl. Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang

(Public Administration Post-Graduate and doctoral)-
Gd. Pascasarjana Undip Lt. 2 Jl. Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang